



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**FGD**

**“Kegiatan Survey Perspektif Stakeholders  
Terhadap UU 25/2004 tentang SPPN”**

**Oleh**

**Emmy Suparmiatun**

**Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas**

**HOTEL IBIS TAMARIN**

**JAKARTA**

**RABU, 5 JUNI 2013**

# Latar Belakang Kegiatan



# UNDANG- UNDANG 25 TAHUN 2004

1

Landasan Hukum di Bidang Perencanaan Pembangunan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Perencanaan Pembangunan Nasional dapat disusun secara Sistematis, Terarah, Terpadu, Menyeluruh dan Tanggap terhadap perubahan

2

Sudah berjalan 8 tahun dan melibatkan banyak *stakeholders*

3

Perlu dilakukan evaluasi sehingga diketahui kendala dan hambatan



# Tujuan Kegiatan

Melihat kembali pada tujuan kegiatan adalah untuk mendapatkan :

1. informasi perspektif *stakeholders* (di Pusat maupun di daerah) terhadap UU 25/2004;
2. Informasi mengenai implementasi UU 25/2004 + kendala + permasalahan;
3. Solusi dan saran.

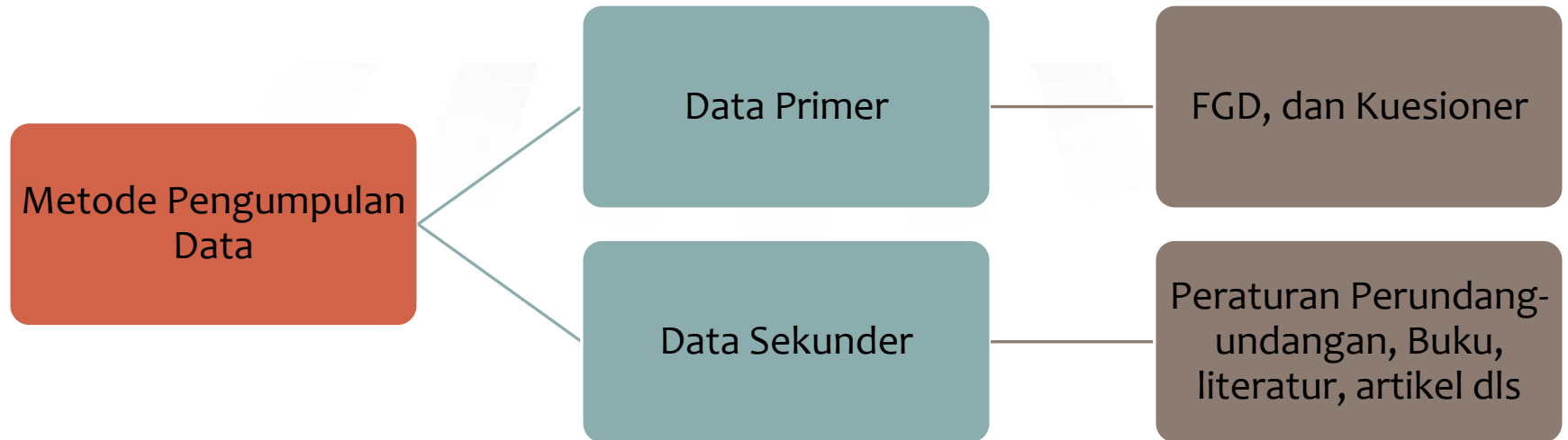
# OUTPUT

DISKUSI DAN  
ISIAN KUESIONER

HAMBATAN,  
SOLUSI DAN  
SARAN DALAM  
PELAKSANAAN  
UU 25/2004

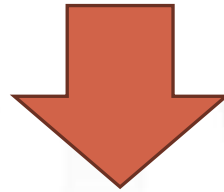
EFEKTIFITAS  
PELAKSANAAN  
UU 25/2004

# Metode Pengumpulan Data



# Alat Analisa

Melalui Metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology*)



Diharapkan akan mendapatkan perspektif *stakeholders* terhadap pelaksanaan UU 25/2004

# ROCCIPI

RULE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah urutan pasal sudah sistematis?</li> <li>• Apakah peraturan turunan amanat UU SPPN sudah lengkap?</li> <li>• Apakah masih diperlukan aturan teknis/operasional lainnya?</li> <li>• Apakah ada pasal yang tidak jelas?</li> <li>• Apakah ada pasal yang bertentangan dengan pasal lainnya?</li> </ul>
OPPORTUNITY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah mekanisme UU SPPN memberatkan <i>stakeholders</i>?</li> </ul>
CAPACITY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah instansi melakukan kegiatan peningkatan kompetensi staf?</li> <li>• Apakah aturan waktu dalam proses penyusunan dan penetapan yang diatur dalam UU 25/2004 dapat dilaksanakan?</li> </ul>
COMMUNICATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dilakukan?</li> <li>• Bimbingan teknis dilakukan?</li> <li>• <i>Stakeholders</i> memiliki akses untuk memberikan <i>feedback</i>?</li> </ul>
INTEREST	Apakah UU 25/2004 memberikan dampak positif bagi kepentingan instansi?
PROCESS	Apakah proses penyusunan dan penetapan perencanaan sudah baik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan?
IDEOLOGY	<i>Stakeholders</i> yakin SPPN diperlukan?

# Laporan hasil FGD Stakeholders untuk Daerah

Telah dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013 di Kota Semarang dan dihadiri oleh beberapa Bappeda Provinsi, Kota dan Kabupaten, antara lain :

1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
2. Bappeda Provinsi Sumatera Barat
3. Bappeda Provinsi Bali
4. Bappeda Provinsi Jawa Timur
5. Bappeda Provinsi Sulawesi Utara
6. Bappeda Kota Semarang
7. Bappeda Kota Mataram
8. Bappeda Kota Pekalongan
9. Bappeda Kota Surakarta
10. Bappeda Kabupaten Karanganyar
11. Bappeda Kabupaten Sleman
12. Bappeda Kabupaten Semarang
13. Bappeda Kabupaten Pati

\* Saat ini hasil kuesioner sedang diolah

# AGENDA FGD

1. Paparan mengenai Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
2. Paparan mengenai evaluasi pelaksanaan UU 25/2004 oleh Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan ;
3. Paparan mengenai efektifitas pelaksanaan UU 25/2004 di Kementerian/Lembaga;
4. Diskusi;
5. Pengisian kuesioner.

# SEKIAN DAN TERIMA KASIH

